

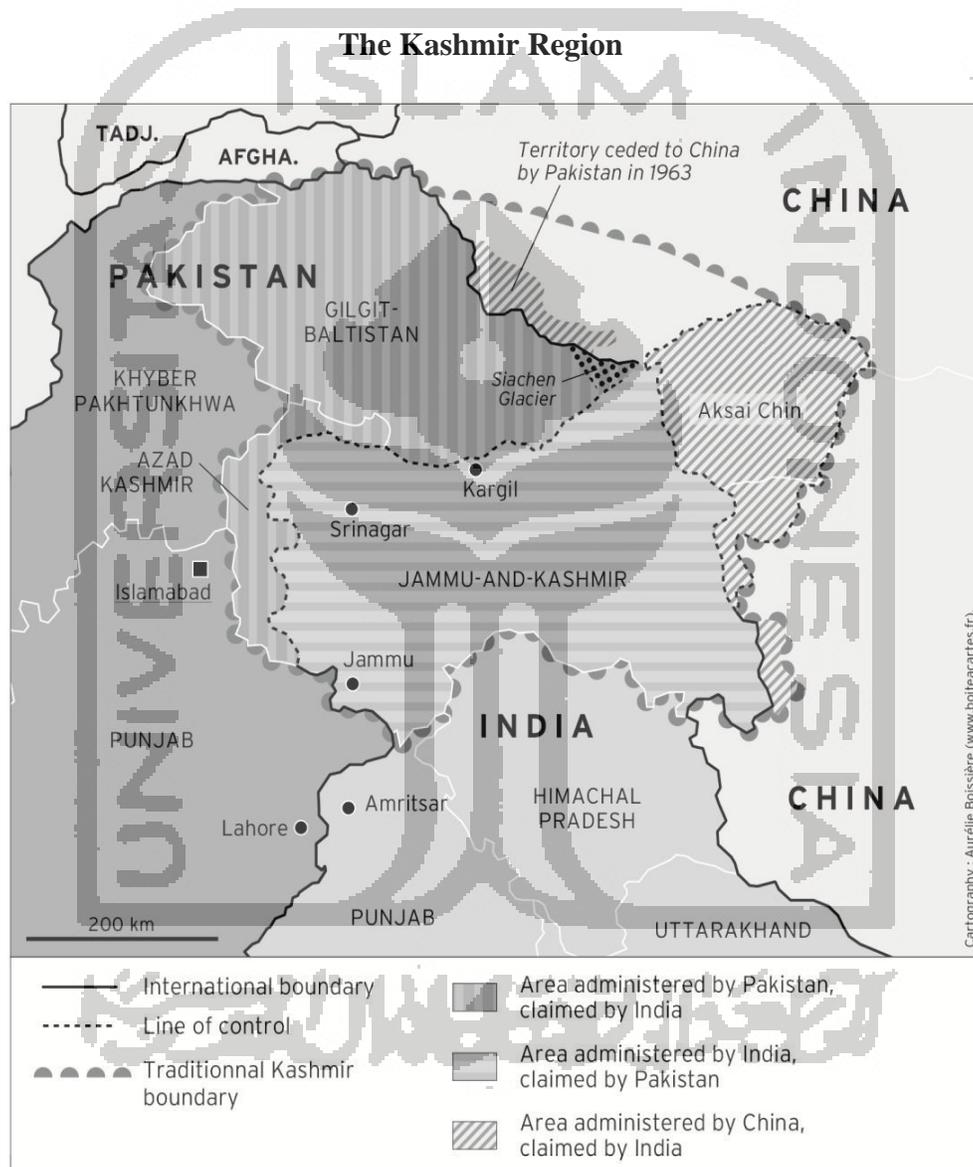
BAB II

DINAMIKA KONFLIK SENGKETA WILAYAH KASHMIR

Konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan menjadi isu bilateral, regional, dan internasional yang fluktuatif. Sejak kedua negara merdeka di tahun 1947, berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Secara bilateral kedua negara selalu melakukan upaya perdamaian melalui diplomasi dan diberikan otonomi khusus untuk wilayah Kashmir. Karena konflik bagaikan bom waktu yang sering terjadi sewaktu – waktu, sehingga upaya pertahanan kedua negara selalu ditingkatkan. Secara regional terdapat organisasi *South Asia Association for Regional Cooperation* (SAARC), yang selalu melakukan pembahasan upaya penyelesaian konflik pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk perdamaian kawasan. Terlebih India dan Pakistan merupakan 2 negara *powerful* di kawasan Asia Selatan, lengkap dengan militer dan nuklir yang menjadi alternatif utama ketika konflik memuncak. Secara internasional *United Nations* (UN) telah mengeluarkan kebijakan untuk resolusi sebagai upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian dunia. Kondisi konflik sengketa wilayah yang sangat kompleks ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan berikut.

Sejak India dan Pakistan merdeka, beberapa kali peperangan terjadi. Tahun 1947-1948 kedua negara tersebut perang memperebutkan wilayah yang dibagi secara sepihak oleh kolonial Inggris, hal tersebut menjadi titik awal konflik sengketa wilayah dimulai dan diakhiri dengan gencatan senjata. Tahun 1965 perang yang

kedua kalinya terjadi dan diakhiri pada “Perjanjian Simla” tahun 1972. Tahun 1999 perang yang ketiga disebut sebagai “Perang Kargil”, terjadi saat musim panas di wilayah Kargil dengan melanggar batas wilayah kedua negara atau *Line of Control* (LoC).



Sumber: (United Nations, 2011)

Kashmir menjadi wilayah yang tidak bertuan ketika Inggris membagi kedua negara menjadi Pakistan dan India karena berdasarkan dari sudut pandang agama yang dianut mayoritas, sehingga mereka memperebutkan Kashmir. India mengendalikan 45% dari bagian tenggara dan timur yaitu Jammu dan Kashmir. Pakistan mengendalikan 35% dari bagian utara dan barat yaitu Azad Kashmir, Gilgit, dan Baltistan. China mengendalikan 20% dari wilayah timur laut yaitu Aksai Chin. Seperti dalam peta berikut ini dan tertulis juga pembagian *Line of Control* yang disepakati dalam Perjanjian Simla.

2.1. PASANG SURUT KONFLIK KASHMIR DAN KEPENTINGAN INDIA

Salah seorang mantan pejabat departemen luar negeri US, Josef Korbel dalam karyanya yang berjudul *Danger in Kashmir* menyebutkan bahwa sejarah Kashmir tak lebih sebagai sebuah cerita tentang kesedihan (*the history of sadness*). Sejarah mencatat bahwa sejak Kashmir dijual oleh kolonial Inggris kepada Raja Gulab Singh, seorang tuan tanah dari keluarga Dogra di Jammu seharga 750.000 *pounds* atau sekitar 7,5 juta *rupee*. Melalui *Treaty of Amritsar* yang ditandatangani pada tahun 1846 dan sejak saat itu Kashmir beserta Jammu berada di bawah kekuasaan Raja Hindu yang menjadi awal penderitaan umat Muslim Kashmir (Mashad, 2004).

Dibawah pemerintahan keluarga Dogra ini, kaum muslim Kashmir India merasa tertindas dan tertekan hidupnya. Mulai dari pendapatan perkapita yang sangat rendah hanya sekitar 11 *rupee* India atau 3 USD, dan penetapan pajak yang tinggi sekitar 21% dari pendapatan perkapita. Serta dalam aspek sosial budaya dikenai

hukuman 10 tahun penjara bagi umat Islam yang menyembelih sapi karena merupakan binatang suci bagi umat Hindu. Dengan berbagai tekanan yang dirasakan umat Muslim Kashmir, akhirnya mereka membentuk kelompok revolusioner untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara adil bagi masyarakat Kashmir tanpa memandang ideologi. Hal ini menjadikan kondisi Kashmir menjadi tidak stabil, dengan semangat jihad yang digunakan kaum muslim untuk melawan pemerintah Kashmir. Maka ketika itu penguasa Kashmir Maharaja Harry Singh meminta bantuan India yang akhirnya menjadi penetapan Kashmir secara resmi terbagi menjadi 2 wilayah pada 27 Oktober 1947, Kashmir India dan Kashmir Pakistan. Penetapan ini bukan menjadi solusi akhir dari konflik di Kashmir, justru menjadi pemantik konflik antara India dan Pakistan yang tidak ada ujungnya. Kondisi kedua negara yang fluktuatif menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki posisi hubungan yang labil.

Konflik sengketa wilayah Kashmir ini bukan hanya semata karena kepentingan politik, namun juga terselip konflik agama, ras dan suku. Dari berbagai kepentingan India, menjadikan wilayah Kashmir semakin kompleks dengan berbagai faktor yang melatar belakangi dan diperebutkan oleh dua negara. Konflik Kashmir menjadi perebutan wilayah oleh kedua negara, dengan berbagai kepentingan yang berbeda. Namun mereka saling berjuang untuk menguasai Kashmir. Beberapa hal yang menjadi latar belakang kepentingan India untuk dapat menguasai Kashmir adalah;

1. Secara sejarah, Kashmir merupakan bagian dari tanah leluhur Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri pertama dan salah satu pendiri India). Maharaja Hary Singh

dan Jawaharlal Nehru bekerja sama agar Kashmir masuk ke wilayah India (Cheema, 2015). Jawaharlal Nehru merupakan tokoh yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat India, sehingga masyarakat India berjuang untuk mempertahankan wilayah Kashmir.

2. Secara geografis, sesuai dengan julukan Kashmir yaitu “tanah surga”. Kashmir memiliki wilayah yang terkenal dengan keindahan alamnya, dengan mengalirnya sungai-sungai besar Indus, Jhelum, dan Chenab yang mendukung bagi sektor pertanian. Selain itu Kashmir berbatasan dengan China, Afghanistan, dan Pakistan yang memiliki prospektif dalam berbagai bidang (Sitepu, 2017).

3. Secara ekonomi, keindahan wilayah Kashmir menarik banyak wisatawan pecinta alam untuk berkunjung. Ditambah dengan hasil bumi seperti padi dan sayur, serta peternakan seperti kuda, sapi, lembu, domba, dll. Kesuburan wilayah Kashmir ini tentu dapat meningkatkan devisa yang sangat besar bagi negara dan dapat digunakan untuk konsumsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kashmir (Sitepu, 2017).

Konflik sengketa wilayah Kashmir ini menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk juga *United Nations* (UN). Isu Kashmir masuk dalam agenda pembahasan UN yang hasilnya membentuk sebuah komisi dengan nama *the United Nations Commission for India and Pakistan* (UNCIP). Dalam agenda pembahasan tersebut menghasilkan resolusi yang fundamental tentang Kashmir pada tanggal 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949. Isi dari resolusi tersebut memberikan penawaran solusi bahwa “Masyarakat Jammu dan Kashmir akan memutuskan sendiri mengenai

statusnya untuk bergabung kepada India atau Pakistan dengan metode demokratis plebisit yang bebas dan menyeluruh di bawah pengawasan UN” (Mashad, 2004).

Ada beberapa hal yang menjadikan UN gagal memaksa India untuk dapat mengimplementasikan resolusi yang telah dijanjikan pasca kedua negara tersebut merdeka. *Pertama*, terdapat kepentingan nasional dari berbagai kekuatan besar dari anggota tetap Dewan Keamanan UN. India dan Rusia merupakan sekutu dalam geopolitiknya. Pakistan bersekutu dengan Amerika Serikat dan banyak kerja sama dengan Tiongkok dalam geopolitik kawasan Asia Selatan. Hal ini menjadi dilema bagi UN untuk mendesak India agar merealisasikan janji damai atas konflik Kashmir. *Kedua*, Inggris harusnya lebih tegas menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pembagian wilayah Kashmir, namun justru Inggris lebih cenderung untuk menjalin kerja sama dengan India karena secara ekonomi lebih prospektif dimasa depan dan antipati terhadap pemerintahan konservatif Pakistan. *Ketiga*, negara-negara di dunia tampaknya lebih cenderung bekerja sama dengan India karena lebih menjanjikan dibandingkan Pakistan. Atas dasar pertimbangan ekonomi tersebut, *the Big Five* (Amerika Serikat, Uni Soviet, Tiongkok, Inggris, dan Perancis) dalam UN dan beberapa negara Muslim anggota OKI lainnya kurang mampu untuk mendesak agar konflik sengketa wilayah Kashmir dapat berakhir sesuai dengan resolusi UN tahun 1949.

India turut andil dalam konflik pembebasan Bangladesh melawan Pakistan dan bersamaan dengan kemerdekaan Bangladesh sehingga disebut juga sebagai perang India – Pakistan 1971. Setelah berakhirnya konflik tersebut, India dan Pakistan membuat perjanjian damai yang disebut “*Simla Agreement*” dan

ditandatangani pada 2 Juli 1972. Salah satu isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah *Line of Control* (LoC) yang menjadi batas untuk kedua negara dalam menguasai wilayah Kashmir. Saat itu kedua negara yang diwakilkan oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dan Presiden Zulfikar Ali Bhutto, saling sepakat untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian untuk kedua negara sesuai dengan perjanjian (Ministry of External Affairs Government of India, 1972).

Perjanjian Simla tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan awal. Masyarakat Kashmir tidak merasa hidup sebagai bagian dari wilayah India, mereka hanya menuntut haknya kepada apa yang telah dijanjikan untuk mereka. Namun pemerintah India berhasil memanipulasi media massa dengan membalikkan opini publik bahwa Kashmir yang berjuang menuntut haknya disebut sebagi gerakan separatis. Kashmir yang membela diri dan melakukan perlawanan atas penindasan dan kesewenang-wenangan oleh rezim India disebut sebagai teroris. Sebagian rakyat sipil Kashmir yang menjadi korban birokrasi intelijen New Delhi justru diputarbalikkan sebagai korban kaum militan Kashmir. Dan penyanderaan para wisatawan asing yang hakekatnya dilakukan oleh rekayasa pemerintahan New Delhi, dosa-dosanya ditimpakan kepada pejuang Kashmir (Mashad, 2004).

Beberapa tahun berlalu setelah berakhirnya Perang Kargil tahun 1999, hubungan India dan Pakistan membawa kabar baik dengan menandatangani kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 2003. Hubungan India dan Pakistan terjaga dengan baik melalui kerja sama yang berlanjut ketika dibawah pemerintahan Mamohan Singh, pada 21 Oktober 2008 kedua negara mulai membuka jalur perdagangan seperti pakaian, rempah, buah, dan lain sebagainya yang melewati

wilayah Kashmir. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi pada 19 April 2012, India melakukan uji coba rudal Agni V yang jangkauannya bisa mencapai Jakarta, Beijing dan beberapa wilayah Eropa bagian selatan. Perdana Menteri Manmohan Singh hanya mengatakan bahwa uji nuklir jarak jauh tersebut hanya sebagai upaya mencari keamanan, kesiapan, dan keberhasilan dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan (BBC Indonesia, 2012).

Rusia merupakan sekutu lama India yang memiliki perjanjian kerja sama militer dan transformasi teknologi nuklir sejak masih Uni Soviet. 24 Desember 2012 Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan kunjungan kerja ke New Delhi sekaligus membahas peningkatan kerja sama militer dan perdagangan. Perdagangan India dan Rusia mencapai lebih dari USD 10 miliar per tahun, India juga tercatat sebagai importir terbesar di dunia dan Rusia memasok 70% dari keperluan senjata India dengan subsidi harga (BBC News, 2012).

Pada 9 Februari 2013, eksekusi hukuman mati kepada Mohammad Afzal Guru yang merupakan salah satu anggota kelompok teroris Jaish-e-Mohammed. Hukuman ini dijatuhkan karena mereka melakukan serangan teror di kantor parlemen India pada tahun 2001 dan Presiden Pranab Mukherjee menolak untuk memberikan remisi hukuman. Berlanjut pada 26 September 2013 Perdana Menteri India Manmohan Singh memperbaiki hubungan dengan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif di New York, untuk sepakat mengurangi intensitas eskalasi militer di Kashmir (Priyamvatha, 2013).

Narendra Modi datang dari Gujarat dengan prestasinya yang sukses diakui masyarakat India, lalu terlepas dari masa lalunya yang diduga terlibat dalam kerusuhan anti muslim tahun 2002 dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Ketika Narendra Modi menggantikan jabatan Perdana Menteri yang dilantik pada 26 Mei 2014, mungkin bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat India. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif hadir memberikan penghormatan di hari pelantikan Perdana Menteri Narendra Modi dan memiliki harapan atas kesempatan yang baik untuk hubungan kedua negara di masa mendatang (BBC Indonesia, 2014).

Baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir, sehingga India memberikan peringatan untuk gencatan senjata dan hubungan kedua negara kembali berseteru. Pakistan mengklaim, India mulai melanggar gencatan senjata dengan memperkuat militernya di wilayah Kashmir. Sedangkan India berargumen, bom gerilyawan yang didukung tentara Pakistan menewaskan seorang tentara India. Pada bulan Agustus 2014 situasi kedua negara berubah dengan sekejap dan akan terus berkembang secara fluktuatif. Perdana Menteri Manmohan Singh berjanji untuk menyelesaikan konflik wilayah perbatasan di Kashmir, namun lebih cenderung menggunakan militer dan hingga akhir 2014 India dan Pakistan saling berbalas kata-kata (CNN Indonesia, 2014).

Tepat pada 1 Maret 2015, *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mufti Mohammad Sayyed dari *Peoples Democratic Party* (PDP) baru saja dilantik oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang berasal dari *Bharatiya Janata Party* (BJP). Tepat pada saat itu partai BJP yang paling berkuasa di India mendeklarasikan untuk bekerja sama dan melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan dengan partai PDP.

Secara garis besar hasil pertemuan dari Perdana Menteri Narendra Modi dan Menteri Utama Mufti Sayyed adalah adanya kesepakatan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Kashmir bagian India baik secara perdamaian, ekonomi, legalitas hukum, maupun eksistensi militer (India Today, 2015). Nirmal Singh dari partai BJP terpilih sebagai Wakil Menteri Utama merupakan bagian hasil dari koalisi PDP dan BJP, yang sebelumnya selalu bertolak belakang kepentingan masyarakat India bagian Utara dan Selatan.

Hampir satu tahun menduduki jabatan sebagai *Chief Minister of Jammu and Kashmir*, Mufti Mohammad Sayeed meninggal pada 7 Januari 2016 dan digantikan oleh putrinya yaitu Mehbooba Mufti. Mewarisi tanggung jawab sebagai pemimpin PDP serta Menteri Utama Kashmir perempuan yang pertama dan terakhir. Kondisi kembali memuncak ketika terjadinya baku tembak di garis *Line of Control* (LoC) pada 13 November 2016. Hubungan keduanya berada pada situasi yang sangat mengkhawatirkan, keduanya saling usir diplomat, saling melarang pemutaran film, serta banyak korban meninggal dan ribuan yang dievakuasi (Sari, 2016). India membawa kasus ini ke sidang umum UN dengan tujuan untuk mengucilkan Pakistan dan *Human Rights Watch* menyerukan untuk mengakhiri tindakan brutal yang melanggar kemanusiaan.

Bertepatan dengan peringatan 1 tahun meninggalnya Burhan Wani seorang militan anti pemerintah India, 7 peziarah Hindu meninggal selama melakukan prosesi keagamaan di distrik selatan Anantnag. Pemerintah India menyudutkan kelompok militan yang berbasis di Pakistan Lashkar-e-Taiba merupakan dalang dibalik serangan yang mengancam 115.000 peziarah Hindu pada 10 Juli 2017. Perdana

Menteri Narendra Modi mengatakan “India tidak akan pernah terjebak oleh serangan dari para pengecut dan mengutuk atas rasa sakit yang kami rasakan”. Kegiatan Amarnath Yatra merupakan rutinitas tahunan umat Hindu di kuil gua bukit Pahalgam, setiap tahunnya selalu terjadi baku tembak antara tentara India dan kelompok militan (Safi, 2017).

Hubungan PDP dan BJP mulai terjadi keretakan sejak awal tahun 2018, adanya perselisihan dan menyebabkan runtuhnya aliansi kedua partai tersebut. 19 Juni 2018 disampaikan secara resmi melalui sekretaris jendral nasional *Bharatiya Janata Party* (BJP) Ram Madhav bahwa “Ketua Menteri Mehbooba Mufti gagal memperbaiki situasi keamanan di wilayah Kashmir, sehingga tidak mungkin bagi BJP untuk melanjutkan aliansi dengan PDP dan pemerintah Kashmir. Kami memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan atas Kashmir kepada Presiden.” (Uniyal, 2018). Selain alasan klasik tersebut, perubahan geopolitik di India tentu menjadi alasan yang sangat kuat dalam mendorong PDP dan BJP untuk meruntuhkan aliansinya.

Setelah BJP menarik diri dari aliansi dan mendesak pemerintah Kashmir untuk mengembalikan kuasa Kashmir kepada negara yang mana Presiden dan Perdana Menteri berasal dari BJP. *Chief Minister of Jammu and Kashmir* Mehbooba Mufti mengundurkan diri dan pemerintah India mengambil alih. Sejak 2016 kedua partai mendeklarasikan untuk membentuk aliansi, tentu bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat kedua partai sejak awal memiliki kepentingan yang bertolak belakang dan hanya menunggu waktu untuk kembali berkonflik. Ketika menyampaikan pengunduran dirinya di depan *pers*, Mufti mengatakan bahwa “Jammu dan Kashmir bukan wilayah musuh, mereka merupakan bagian dari India

yang harus diperhatikan. Kebijakan yang keras tidak akan berhasil di Kashmir.” Hal ini merujuk pada kebijakan Perdana Menteri Narendra Modi yang cenderung lebih keras dan selalu menggunakan militer dalam menyelesaikan masalah Kashmir (Fareed, 2018). Sejak 20 Juni 2018 secara resmi pemerintah India mengambil alih kuasa atas Kashmir, dan banyak diprediksi akan semakin sulit untuk hidup dengan damai bagi masyarakat Kashmir.

Dinamika konflik sengketa wilayah Kashmir yang fluktuatif sangat tepat untuk dianalisis menggunakan teori diplomasi koersif. Pembahasan tersebut akan dilanjutkan pada bab selanjutnya, disertai data-data untuk memperjelas mengenai analisis teori diplomasi koersif dengan studi kasus konflik sengketa wilayah Kashmir.

2.2. PERAN SAARC

South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) merupakan organisasi regional Asia Selatan digagas pada 8 Desember 1985 yang terdiri dari Afghanistan, Bhutan, Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Sesuai dengan piagam SAARC, organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk :

“To promote the welfare of the peoples of South Asia and to improve their quality of life; to accelerate economic growth, social progress and cultural development in the region and to provide all individuals the opportunity to live in dignity and to realize their full potentials; to promote and strengthen collective self-reliance among the countries of South Asia; to contribute to mutual trust,

understanding and appreciation of one another's problems; to promote active collaboration and mutual assistance in the economic, social, cultural, technical and scientific fields; to strengthen cooperation with other developing countries; to strengthen cooperation among themselves in international forums on matters of common interests; and to cooperate with international and regional organizations with similar aims and purposes” (SAARC, 1985)

Dengan piagam SAARC yang sama-sama telah disepakati seluruh anggota negara kawasan Asia Selatan, masih menyisakan konflik sengketa wilayah Kashmir yang fluktuatif. Tentunya SAARC sebagai pihak ketiga dan atau mediator memiliki kewajiban untuk andil dalam penyelesaian konflik sengketa tersebut. KTT SAARC selalu membahas konflik sengketa wilayah Kashmir, mengingat India dan Pakistan merupakan negara yang kuat dalam kawasan Asia Selatan. Internasionalisasi isu selalu dilakukan oleh Pakistan, dengan tujuan untuk mendapatkan simpati masyarakat internasional dan mampu mendesak India agar konflik bisa berakhir. Pada setiap agenda internasional dalam UN maupun secara regional dalam SAARC, Pakistan selalu berusaha untuk mengangkat isu sengketa wilayah Kashmir.

Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2018 SAARC mempertemukan India dan Pakistan meskipun belum sampai pada titik akhir konflik, namun mediasi dilakukan sebagai upaya mengatasi konflik tersebut. Keterlibatan SAARC bukan hanya menunaikan kewajibannya sebagai organisasi yang diharapkan mampu menjaga keamanan dan kestabilan kawasan, namun terdapat kepentingan lain yang

mendorongnya untuk selalu menjadikan Kashmir sebagai salah satu topik bahasan yang tidak berujung.

Pada tahun 1999 terjadi perang Kargil di perbatasan wilayah India dan Pakistan yang diakhiri dengan India berhasil merebut kembali wilayah Kargil dan membekukan hubungan diplomatik dengan Pakistan. Hubungan diplomatik kedua negara kembali terjalin pada KTT ke 11 tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2008 banyak terjadi dialog perdamaian antar kedua negara meski tidak memiliki harapan perdamaian yang tinggi. Akhir 2008 hubungan India Pakistan kembali memuncak dimulai dengan serangan teroris di Mumbai.

KTT ke 18 pada 26 November 2014 di Nepal, hasil sangat jauh dari harapan. Pada KTT ini hanya memiliki 3 perjanjian yang menjadi agenda pembahasan SAARC bersama, namun hanya satu yang disepakati yaitu *connectivity agreements on road*. Untuk pembahasan mengenai kereta api & energi, dan investasi yang didukung oleh 8 negara anggota SAARC untuk meningkatkan kesejahteraan kawasan masih belum bisa disepakati bersama karena Pakistan masih memiliki kendala konflik internal (Muni, 2014). Setidaknya dengan terjalinnya kerja sama India dan Pakistan, konflik mampu diredam untuk sementara waktu.

Pada KTT SAARC ke 19 yang direncanakan akan digelar pada 9-10 November 2016 di Islamabad dibatalkan. Berawal dari India yang tidak berkenan menghadiri agenda tersebut, lalu disusul dengan Bangladesh, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka, dan Maldives ikut memboikot Pakistan. India bersitegang dengan Pakistan karena terjadi serangan oleh kelompok teroris dari Pakistan Jaish-e-Mohammed di

kamp militer Uri daerah Kashmir dan 18 tentara India terbunuh. Bangladesh selama beberapa bulan terakhir menjelang KTT ke 19 terlibat perang kata-kata, yang mana Pakistan menuduh Bangladesh banyak mengeksekusi elite politik Pakistan pada perang tahun 1971 untuk kemerdekaan Bangladesh. Afghanistan, Bhutan, Sri Lanka, dan Maldives menyatakan keprihatinan atas kondisi regionalnya yang sedang waspada akan organisasi terorisme yang berkembang dan di danai oleh Pakistan. Mereka bersepakat untuk memerangi terorisme yang mengancam perdamaian regional & internasional, sehingga KTT 19 dibatalkan dan dijadwalkan kembali KTT pada tahun 2020 di Sri Lanka (Jayanth & Anil, 2016). Besar harapan bagi negara anggota SAARC pada KTT 2020 akan terlaksana sesuai agenda, mengingat banyak konflik dan masalah negara anggota maupun regional yang harus segera dibahas.

